

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aromatica, D., Santoso, A., Ningsih, Y., Netti, H., Rela, I. Z., Selly, R. N., ... & Oktaviani, E. (2024). *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara: Sumedang.
- Chazawi, Adami. (2022). *Hukum pidana materiil dan formil KORUPSI di Indonesia*. Media Nusa Creative (MNC Publishing): Malang.
- Dadek, T. A., Jalil, H., Syahbandir, M., & Kadir, M. Y. K. A. (2023). *Politik Hukum Penanggulangan Wabah (Covid-19) di Indonesia*. Syiah Kuala University Press.
- Gulton, Maidin. (2022). *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Afrika Aditama, Bandung.
- Jainah, Z. O. (2021). *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika-Rajawali Pers*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.
- Lusia Sulastri, S. H. (2023). *Pengaruh Obstruction Of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Di Indonesia*. PUSTAKA AKSARA.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Lakeisha: Klaten.
- Putri, A. R. (2021). *BRANTAS KORUPSI. Suara Generasi tentang Budaya Antikorupsi*. CV Srikandi Kreatif Nusantara: Kediri.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2022). *Pendidikan antikorupsi: Kajian antikorupsi teori dan praktik*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., ... & Sulistiana, D. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press: Malang.
- Siregar, I. P. (2022). *Kajian Dasar-Dasar Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit P4I.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray: Makassar.
- Yagus Suyadi, S. H. (2024). *Menuntaskan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Sinar Grafika: Jakarta.

Yunaldi, W., Hazmi, R. M., & Arman, Z. (2024). *Belenggu Rente Dalam Demokrasi*. CV. Gita Lentera: Padang.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara tahun 2016 Nomor 1693)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diundangkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 876).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 1/100.HK.02.01/III Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Jurnal :

Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan

- Tahun 2015). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v3i1.404>
- Alamsyah, M. E., & Rahmat., D. (2024). ANALISIS YURIDIS PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN PRAKTIK MAFIA TANAH DI PEKANBARU. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.08221/lexomnibus.v1i1.53>
- Ambarwati, A. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Efektifkah?. *Dinamika Hukum*, Vol. 22, No. 1, 1-10. <https://doi.org/10.35315/dh.v22i1.8382>
- Budiman, N. N. M. B. (2024). Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Perspektif Viktimologi. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 12, No. 2, 171-183. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i2.1824>
- Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, Vol 2, No 2, 448-459. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Hasibuan, M. N. P., & Prasetyo, M. H. (2022). Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7. No. 1, 159-176. <https://shorturl.at/fdjp0>
- Hidayatulloh, M. R. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Parkir Ilegal. *Jurnal Legisla*, Vol. 15, No. 1, 36-49. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.250>
- Keliat, C. (2020). Kebijakan Pidana dalam Penanggulangan Pungutan Liar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk oleh Oknum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, Vol. 1 No.1, 60-74. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.34>
- Kukuh Sudarmanto, Zaenal Arifin, Tirsia Tatara, (2023), Tindak Pidana Korupsi Bidang Pertanahan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), *Jurnal USM Law Review*, Vol.6 No.1. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6400>

- Laurensius, A. S. (2020). Penegakan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Kasus. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22, No. 1. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/13564>
- Mirza, Tony. (2019). Implementasi kebijakan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)(studi kasus pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir). *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, Vol 4. No. 2. <https://doi.org/10.36982/jpg.v4i2.691>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, No. 1. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Musofiana, I. (2024). Efektivitas Perubahan Hukum Terhadap Perubahan Sosial (Kebijakan Light on di Siang Hari pada Kendaraan Motor). *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 24, No. 01. <https://doi.org/10.31849/respublica.v24i01.23944>
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, 294-312. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/92>
- Paruki, N. R. A., & Ahmad, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal. *Batulis Civil Law Review*, Vol. 3, No. 2, 177-186. <https://10.47268/ballrev.v3i2.966>
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, Vol. 4, No. 1, 142-159. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1625>
- Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 1, 31. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.31-52>
- Ramadhani, W. (2017). Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 263-276. <https://shorturl.at/7X80r>
- Rohaya, Y., Sumiati, D., & Komalasari, C. (2023). PUNGUTAN LIAR PADA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM. *Journal Presumption of Law*, Vol. 5, No. 2, 171-187. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i2.6509>
- Rinaldi, F. A., & Wijaya, B. K. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana

- Nasabah. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 2, 3437-3447. <https://doi.org/10.62710/9pwz7812>
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas “Equality Before The Law”. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol. 1, No. 2, 298-310. <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/545>
- Safitri, A., Haryanto, I., Rahim, A., Musahrain, M., & Nurhairunnisah, N. (2021). Analisis Pembudayaan Gemar Membaca Sebagai Kajian Pembentukan Perda di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Literasi Dan Pembelajaran Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 43-49. <https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/JLPI/article/view/41>
- Saraya, S., Handayani, Y., & Yusuf, A. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL Di Desa Sidomukti Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v3i2.110>
- Siregar, R. H. S. (2022). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Yang Dilakukan Oknum Perangkat Desa (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, Vol. 2, No. 6. <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1944>
- Suandy, A. I., & Risma, A. (2021). Pengecualian Sengketa Tanah Dalam Tata Cara Gugatan Sederhana (Small Claim Court). *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 2. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i2.331>
- Sudirman, M. A., Amiruddin, A., & Parman, L. (2020). Tindakan maladministrasi dalam perspektif tindak pidana korupsi. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 232-258. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1952>
- Suharto, S., & Firdian, Z. Y. (2023). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021. *Jurnal Lanskap Politik*, Vol. 1, No. 2. <http://dx.doi.org/10.31942/jlp.2023.1.2.8376>
- Sutardjo, R., & Sahari, A. (2023). PROSES PENYIDIKKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR SECARA TERORGANISIR (STUDI DI KEPOLISIAN SAT RESKRIM POLRES BINJAI). *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, Vol. 2, No. 2. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/DOKTRIN/article/view/18503>
- Suyikati, S. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. *Widya*

Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, Vo. 1, No. 2.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43>

Syahroni, Muh Arief, et al. (2024). Peningkatan Kesadaran Pejabat Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol 4. No 2 (2024): 170-177. https://jurnalkip.samawa-university.ac.id/KARYA_JPM/article/view/730

Tardjono, H. (2021). Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, 51-64. <https://doi.org/10.32502/khk.v3i2.3462>

Tomy A.P.S, Hananto Widodo, (2022), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Panitia Desa Pada Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Desa X Kecamatan Dudusampeyan Kabupaten Gresik, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol.9 No.3. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.41570>

Wibowo, A. P. (2023). Pungutan Pemerintahan Desa Terhadap Masyarakat Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal HUKUM BISNIS*, Vol. 7. No. 2, 1037-1050. <https://shorturl.at/Y2LNy>

Wiguna, I. W. A. Y., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 139-144. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2351.139-144>

Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian deskripsi dalam ilmu komunikasi. *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 83-90. <https://shorturl.at/NM8jO>

Skripsi, Tesis dan Disertasi :

Hassan, S. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi PTSL di Desa Sidomukti Kecamatan Waleri Kabupaten Kendal*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Lintang, A. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungli Oleh Kades Suko Kecamatan Sukodono Pada Pendaftaran Tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kejaksaan Negeri Sidoarjo*. (Skripsi Sarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya).

Internet:

Radarsidoarjo. (2023, November 5). *Dugaan pungli PTSL, Kades Kletek Taman Sidoarjo dituntut 1 tahun 10 bulan penjara*. Diakses dari <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855278491/dugaan-pungli-pts-l-kades-kletek-taman-sidoarjo-dituntut-1-tahun-10-bulan-penjara>

Lain -Lain :

Padma, Ardhi. Penyidik di Bidang Tidak Pidana Khusus. “Jumlah Kasus Pungli PTSL”. Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Hasil Wawancara Pribadi : 7 Januari 2025.

I Putu, Kisnu. Kasubsi Penuntutan di Bidang Tindak Pidana Khusus. “Mekanisme Penegakan Hukum dalam Perkara PTSL”. Hasil Wawancara Pribadi : 25 Februari 2025.